

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak kawasan pesisir yang kaya dan sangat produktif, tetapi banyaknya potensi di kawasan pesisir belum membuat masyarakat nelayan menjadi sejahtera. Ketertinggalan ekonomi nelayan disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara optimal. Pengembangan ekonomi lokal tidak hanya menekankan peningkatan ekonomi, tetapi juga penguatan kemitraan dan kerja sama antar pelaku (*stakeholders*). Setiap pelaku memiliki potensi, kemampuan, dan keunggulan tersendiri yang dapat dimanfaatkan secara bersama untuk meningkatkan perekonomian wilayah (Dahuri, 2004:54).

Begitu pun potensi lahan kelautan dan perikanan di Bandar Lampung cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan secara optimal tanpa mengganggu kelestariannya dengan tingkat efektifitas melalui usaha ekstensifikasi, identifikasi, diverifikasi dan rehabilitasi serta dengan menggunakan teknologi tepat guna dan memberikan prioritas utama terhadap komoditas ekonomis penting serta komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, disamping itu usaha pengembangan kelautan perikanan juga memungkinkan untuk ekstensifikasi

dengan mendorong ke arah penangkapan jarak jauh serta pengembangan usaha budidaya laut pada lokasi potensial.

Salah satu wilayah yang penduduknya sebagai nelayan adalah desa Hurun Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran dipilih sebagai lokasi penelitian karena bukan saja jumlah nelayannya yang banyak tetapi juga karena merupakan salah satu kecamatan yang tingkat rumah tangga pra sejahteranya tinggi. Sedangkan Potensi usaha budidaya laut yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pesawaran sesuai dengan SK Gubernur Lampung No.G/256/BII/HK/1982 tanggal 31 Desember 1982 dengan luas  $\pm$  3.685,5 Ha dengan perincian; untuk budidaya tiram mutiara 3.260,5 Ha, rumput laut 250 Ha, ikan kerapu 50 Ha, ikan baronang 50 dan budidaya teripang 25 Ha (BPS, 2014).

Keluarga prasejahtera terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar ini bergantung terhadap tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Menurut Syechalad dan Rachmad (2009), faktor harga ikan memiliki pengaruh paling dominan bila dibandingkan dengan modal kerja, jam kerja melaut, dan teknologi. Ikan yang biasa didapat oleh nelayan obor ialah jenis ikan tanjan dengan harga rata-rata (Rp 8.400,00/kg) dan bleberan dengan harga rata-rata (Rp 7.700,00/kg). Harga ini dibandingkan dengan harga jenis ikan lain termasuk paling murah, sedangkan jenis ikan yang biasa didapat oleh kapal motor besar

seperti tongkol dengan harga rata-rata (Rp 13.400,00/kg), kembung dengan harga rata-rata (Rp 18.260,00/kg) dan bentong dengan harga rata-rata (Rp 25.800,00/kg). Harga ikan ini adalah rata-rata harga di tingkat produsen ikan di Kota Bandar Lampung lima 5 tahun terakhir (BPS, 2014)

Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan perikanan. Jumlah masyarakat perikanan yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kampung Nelayan di Kota Bandar Lampung masih cukup besar. (<http://sp.beritasatu.com/home/nelayan-pertanyakan-program-pembinaan-dkp-lampung-timur/32114>., diakses tanggal 1 April 2015).

Pada prinsipnya *pro growth* dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kemungkinan laju inflasi serta menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Penekanan mendasar dilakukan dengan pemberdayaan sektor-sektor yang ada seperti perdagangan, perhotelan, dan jasa-jasa yang memberikan kontribusi daerah. *Pro Poor* artinya pendekatan pembangunan ekonomi ini lebih diarahkan untuk berpihak kepada masyarakat miskin (masyarakat marginal) khususnya nelayan. *Pro job*, memberi ruang yang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan kerja, dimana masyarakat nelayan dituntut untuk tidak memiliki satu pekerjaan saja dalam meningkatkan pendapatannya.

Pemerintah memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat nelayan juga merangsang kreatifitas usaha bagi nelayan melalui program kemitraan nelayan.

Salah satu program kemitraan nelayan yang telah berjalan selama 4 tahun di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan dan Bandar Lampung adalah Program Kemitraan Budidaya Ikan Kerapu. Program ini ditujukan kepada warga masyarakat nelayan di desa tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini berupa seberapa besar kemanfaatan kemitraan serta suatu kontribusi bagaimana pandangan masyarakat akan program kemitraan ini dan bagaimana bentuk-bentuk pembinaan yang harus diberikan sehingga kemitraan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Program kemitraan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa Jelarang, namun masih perlu pembenahan khususnya dalam hal peningkatan SDM dan manajemen. Sosialisasi sejak dini kepada masyarakat secara luas dan transparan terutama tentang sistem bagi hasil perlu dilakukan. <http://kemitraankerapu.blogspot.com/program-kemitraan.html>, diunggah tanggal 11 Mei 2015).

Pola kemitraan yang baik (ideal) tentu saja adalah hubungan kerja yang menunjukkan persamaan hak kedudukan yang sama. Saling menguntungkan dan saling bahu-membahu. Sehingga dengan demikian tidak ada yang merasa paling superior, paling dominan, dan lain-lain. Karena itu, jangan sekali-kali kedua belah pihak yang bermitra melanggar perjanjian kerjasama. Pasalnya, hal itu justru akan merugikan kedua belah. Tapi, sebaiknya sebelum melakukan pola kemitraan. Kedua belah pihak terlebih dahulu menyamakan persepsi mengenai apa itu pola kemitraan. Dengan demikian, diharapkan kedepan hal-hal yang tidak diinginkan

tidak muncul. Harus diakui bahwa pola kemitraan sangat menguntungkan pembudidaya ikan. Selain untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pembudidaya ikan pedesaan.

Pengembangan ekonomi lokal tidak hanya menekankan peningkatan ekonomi, tetapi juga penguatan kemitraan dan kerja sama antar pelaku (*stakeholders*). Setiap pelaku memiliki potensi, kemampuan, dan keunggulan tersendiri yang dapat dimanfaatkan secara bersama untuk meningkatkan perekonomian wilayah (Sundawati dan Trison, 2006: 58).

Potensi ini akan efektif jika *stakeholders* terlibat dalam kemitraan yang menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Nelayan sebagai salah satu *stakeholders* memiliki berbagai keterbatasan, sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal adalah melalui kemitraan. Penelitian ini dibutuhkan untuk mengungkapkan kondisi kemitraan nelayan terutama menyangkut bentuk, jangka waktu, manfaat, dan permasalahan kemitraan pada nelayan (Supriyadi R, 2007: 58)

Selama ini terlihat bahwa pembudidaya ikan selalu tergantung bantuan dari pemerintah baik itu pemda maupun pusat. Pola kemitraan setidaknya bisa menanggulangi kemiskinan. Ini mengingat 30 juta rakyat miskin di Indonesia, dan 30 persen di antaranya merupakan masyarakat kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Dengan pola kemitraan diharapkan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dapat hidup sejahtera dan pertumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya di pedesaan juga dapat

terdorong (<http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/12/20/mendorong-pola-kemitraan-pada-budidaya-ikan-422987.html>, diakses tanggal 6 Mei 2015).

Hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data bentuk kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kewirausahaan masyarakat nelayan dilakukan dengan lembaga budidaya Forum Kerapu Lampung (Fokel) yaitu perkumpulan para pembudidaya ikan kerapu yang ada di Provinsi Lampung dan *Shrimp Club Indonesia* (SCI) adalah sebatas koordinasi. Lokasi pembudidayaan terletak di Pantai Ringgung, Legundi dan Tanjung Putus. Permasalahan yang muncul dari kemitraan tersebut adalah pada dana yang minim, serta menurunnya ekspor ke negara tujuan seperti Jepang dan China yang hanya mencapai 76 ton, sedangkan biasanya mencapai 355,82 ton (Hasil Prariset, tanggal 4 September 2015).

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis tertarik meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul: **Strategi Kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Kewirausahaan Masyarakat Nelayan (Studi di Pantai Sari Ringgung)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah:

1. Bagaimana potensi nelayan dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung?

2. Bagaimana strategi kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam kewirausahaan masyarakat nelayan?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan potensi nelayan dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
2. Untuk menentukan strategi kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam kewirausahaan masyarakat nelayan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan dan pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Strategi kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam kewirausahaan masyarakat nelayan

#### **2. Secara Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya dalam rangka Strategi kemitraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam kewirausahaan masyarakat nelayan.